



PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: PENGALAMAN KAUM MUSLIM PATTANI

Indah Puspita Sari¹, Imam Ghazali Said²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

02040123021@uinsa.ac.id¹

Abstrak

Pemerintah Thailand yang mencetuskan ide Thaifikasi mendapat penentangan dari kaum Muslim Pattani. Pemerintah Thailand melakukan beberapa pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Pattani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat muslim Pattani yang menganut agama Islam sebagai agama minoritas di Thailand. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan teknik wawancara yang subjeknya adalah tiga orang Muslim berkebangsaan Thailand dan pengumpulan data berupa buku dan jurnal yang berkaitan. Hasilnya pemerintah Thailand melakukan pelanggaran diantaranya; hak sosial dan budaya dengan melarang penggunaan bahasa Melayu selain itu masyarakat Thai-Buddha menyebut masyarakat Muslim Pattani dengan panggilan *Khaek* yang berarti orang pendatang atau bodoh. Pelanggaran hak ekonomi, masyarakat Muslim Pattani hidup di bawah garis kemiskinan karena pemerintah Thailand tidak melakukan pembangunan secara merata. Pelanggaran hak hidup, yakni ratusan orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi di wilayah selatan Thailand.

Kata kunci: Muslim, Pattani, Thailand

Abstract

The Thai government that came up with the idea of Thaification was opposed by the Pattani Muslims. The Thai government committed several human rights violations against the Pattani Muslim community. The purpose of this research is to find out the human rights violations committed by the Thai government against the Pattani Muslim community who adhere to Islam as a minority religion in Thailand. This article uses qualitative research methods and data collection with interview techniques whose subjects are three Muslims of Thai nationality and data collection in the form of books and journals related. The result is that the Thai government violates, among others; social and cultural rights by prohibiting the use of the Malay language in addition to the Thai-Buddhist community calling the Pattani Muslim community Khaek which means immigrant or stupid. Violation of economic rights, the Pattani Muslim community lives below the poverty line because the Thai government does not carry out development evenly. Violation of the right to life, namely hundreds of people died and suffered injuries due to attacks that occurred in the southern region of Thailand.

Keywords: Muslim, Pattani, Thailand

PENDAHULUAN

Para pakar hukum di Eropa sepakat bahwa sejarah dari hak asasi manusia dimulai saat munculnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215. Magna Charta berisikan tentang raja yang melanggar aturan kekuasaan dan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan bangsawan (Rifa'i, 2024). Perkembangan hak asasi manusia menjadi lebih kompleks pada saat terbentuknya *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dari PBB adalah menjaga perdamaian dunia dan memecahkan masalah dunia terkait ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui deklarasi-deklarasi yang di usung selalu menjelaskan tentang hak-hak manusia. Secara umum dalam konteks internasional, hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I), hak-hak bidang ekonomi, sosial dan budaya (generasi II), dan hak-hak atas pembangunan (generasi III).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat oleh setiap individu yang tinggal di muka bumi. Hak ini bukan diberikan oleh organisasi, pemerintah, atau negara melainkan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa karena semata-mata ia manusia. John Lock percaya bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (Bazary et al., 2024). Tidak peduli seburuk apapun perlakuan orang lain terhadap seseorang, hak yang melekat padanya tidak dapat terhapuskan. Hak asasi manusia menegaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan hak yang sama dan tidak ada golongan yang lebih diunggul atau direndahkan. Perbedaan warna kulit, agama, ras, atau bahasa tidak dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan haknya. Negara menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakatnya.

Meskipun dunia internasional telah mendeklarasikan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia nyatanya tidak semua orang di dunia ini mendapat hak-haknya. Dunia masih dihadapkan dengan bencana kelaparan, kekeringan, perang, eksploitasi anak, perdagangan manusia dan diskriminasi. Diskriminasi berbasis etnis dan kasta kemudian diskriminasi terhadap masyarakat masih sering terjadi ("Kondisi Hak Asasi Manusia Di Dunia," 2024). Pengekangan kebebasan pilihan setiap individu atau pemberlakuan yang tidak adil oleh pemerintah menjadi polemik yang menarik untuk dibahas. Seperti halnya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat Muslim Pattani. Pattani berada di bagian selatan negara Thailand yang mayoritas beragama Muslim. Pemerintah

Thailand memperlakukan masyarakat Muslim Pattani berbeda dari masyarakat Thai-Buddha. Perlakuan yang tidak sama inilah yang menjadikan kehidupan masyarakat Muslim Pattani menjadi sengsara. Mayoritas penduduk Thailand selain di wilayah selatan apabila dilihat dari aspek etnis, bahasa, dan sejarah berbeda dengan Melayu Pattani yang berada di wilayah Thailand bagian selatan. Mayoritas penduduk Thailand tergolong etnis Indochina dan menganut agama Buddha yang telah berlangsung lama (Hidayat, 2022). Masyarakat Thailand menganut agama Buddha Treveda, kehidupan yang dilaksanakan masyarakat Thai-Budhha mengikuti pola-pola dan tata cara berpikir yang serasi dengan ajaran Buddha. Masyarakat Thai-Buddha yakin kehidupan di dunia ini merupakan siklus yang berulang-ulang dan hanya diri mereka sendiri yang bisa menghentikan kelahiran kembali. Jikapun harus terlahir kembali mereka menginginkan terlahir sebagai orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Apabila telah terlepas dari reinkarnasi mereka masuk ke kehidupan abadi yakni Nirwana (Yuliani & Purwanto, 2022).

Pada tahun 1909, Thailand dan Inggris menandatangani “The Anglo-Thai Treaty”. Perjanjian ini adalah garis demarkasi antara Inggris, Thailand, dan Malaysia (Kaewsom et al., 2012). Inti dari perjanjian Anglo-Siam adalah menyatakan bahwa Pattani Raya bukan merupakan dari bagian Kerajaan Melayu lagi melainkan sudah masuk ke Kerajaan Siam (Thailand). Perubahan ini menjadi titik awal masyarakat melayu Muslim yang sebelumnya mayoritas menjadi minoritas di wilayah Thailand.

Pada abad ke 20 dan ke 21 masyarakat Pattani mengalami berbagai ancaman dari pemerintah Thailand. Pemerintah Thailand membuat Thaifikasi untuk menyeragamkan warga negara yang tinggal di Thailand. Seperti dalam jurnal Masyarakat Muslim Thailand Dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya oleh Bayu Mitra Adhyatma Kusuma (Kusuma, 2016) menuliskan bahwa masyarakat Pattani Muslim mengalami kehidupan yang tertekan atas asimilasi budaya yang secara psikologis berdampak negatif terhadap kehidupan. Kemudian jurnal Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam oleh Mr. Ilham Nuereng (Nuereng, 2017) yang menemukan bahwa konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh faktor historis, agama, sosial dan politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengalaman masyarakat Muslim Pattani dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam

aspek hak sosial budaya, ekonomi, dan hak hidup. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat Muslim Pattani saat ini serta menganalisis peran tokoh agama dalam memberikan penyuluhan dan membangun kehidupan antarumat beragama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian dan melakukan wawancara. Subjek penelitian terdiri dari tiga orang Muslim yang berkebangsaan Thailand, masing-masing berasal dari daerah yang berbeda yakni dua dari Pattani yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia, dan satu lagi dari Nakhon si Thammarat yang kini tinggal di Thailand dengan lingkungan mayoritas Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Melayu Pattani berada di sisi selatan negara Thailand. Masyarakat ini disebut dengan *Sam Changwat Chaiden Paktai*, disebut demikian karena bermukim di tiga provinsi yakni Pattani, Yala dan Narathiwat (Djusmalinar, 2014). Pattani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Mayoritas penduduk Pattani beragama Islam (80%) (Hafil & Damayanti, 2021). Penduduk masyarakat yang kebanyakan beragama Islam membuat banyak persamaan budaya yang bercorak Islam dengan negara Indonesia atau Malaysia. Seperti adanya bubur asyura, perayaan Idul Fitri, dan mudik lebaran. Mata pencaharian masyarakat Pattani sebagai petani dan nelayan. Ditinjau dari sejarah wilayah Pattani yang kini tergabung ke negara Thailand dulunya ialah wilayah yang termasuk ke bagian Kesultanan Pattani. Dari aspek budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakat Pattani lebih menyerupai dengan ras Melayu daripada ras Thailand.

Pattani yang termasuk ke wilayah selatan Thailand merupakan daerah yang rawan konflik. Asal usul konflik di Thailand selatan dapat ditelusuri dari hasil perjanjian Anglo-Siam 1909 yang memisahkan suku Melayu menjadi dua komunitas yakni wilayah Pattani bergabung ke Kerajaan Siam (Thailand) dan lainnya bergabung dengan komunitas Melayu di bawah koloni Inggris yang kini tergabung ke negara Malaysia (Helmiati, 2016). Ketegangan dan konflik yang terjadi di mulai saat Kerajaan

Siam mengembangkan nasionalisme modern Thailand dengan wujud Kerajaan Konstitusional. Thailand memaksakan masyarakat Muslim Pattani untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari Kerajaan Siam. Hal ini dirasa sebagai pengkisian kebudayaan Melayu dari masyarakat Muslim Pattani.

Butir-butir yang ada dalam Hak Asasi Manusia terdapat adanya hak-hak seperti hak politik, sosial budaya, ekonomi. Adanya hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin kehidupan setiap individu di dunia. Apabila hak-hak tersebut didapatkan oleh manusia maka hidupnya sejahtera. Namun pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tetap ada hingga hari ini. Pelanggaran dan perampasan hak yang dilakukan oleh sekelompok manusia hanya menguntungkan pihak tertentu dan mengakibatkan kesengsaraan bagi pihak lainnya. Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.GA 2106 A (XX) telah menetapkan sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial sebagaimana didefinisikan dalam konvensi ini mencakup segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatalan, atau pilihan yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang bertujuan atau menghambat pengakuan terhadap hak asasi manusia (Hasyim, 2018).

Pemerintah Thailand dan masyarakat Pattani sering berseteru dan menyebabkan berbagai kerusakan atau rasa ancaman bagi masyarakat. Konflik di Pattani tidak terlepas dari unsur-unsur agama (Ramadhan, 2021). Hak asasi manusia yang bersifat *given* dari Tuhan seakan-akan tidak dinikmati oleh masyarakat Muslim Pattani. Masyarakat Muslim Pattani mendapatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dari pemerintah Thailand. Di tanah mereka sendiri Muslim Pattani mengalami diskriminasi. Secara umum pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Muslim Pattani dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah Thailand memperlakukan masyarakat Muslim Pattani dengan kejam. Kejahatan yang dilakukan pemerintah Thailand membuat masyarakat Muslim Pattani melakukan pemberontakan dan gerakan separatisme (memisahkan diri). Gerakan ini berjalan baik secara legal dan illegal sebagai usaha pemulihan identitas kultural dan agama bagi masyarakat Muslim Pattani yang terseok-seok akibat asimilasi budaya Thailand (Jamaludin, 2017).

Pelanggaran Hak Sosial dan Budaya

Pada bulan Desember 1948 Majelis Umum PBB menerima dan mengesahkan Deklarasi Umum HAM PBB (DUHAM PBB). Deklarasi ini memuat norma-norma hak asasi manusia di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Norma-norma tersebut yang disusun dalam bentuk deklarasi dan menjadi standar atau pedoman yang pelaksanaan hak asasi manusia bagi semua bangsa dan negara di dunia.

Dalam aspek sosial budaya masyarakat Muslim Pattani dipaksakan untuk berbudaya seperti Thai-Buddha. Pemerintah Thailand menerapkan program Thaifikasi, program ini adalah proses yang mana orang-orang dari budaya dan etnis yang berbeda yang tinggal di Thailand menjadi berasimilasi dengan budaya dominan Thailand yakni Thailand Tengah. Negara Thailand secara geografis dibagi menjadi tiga wilayah yakni Thailand Utara, Thailand Tengah, dan Thailand Selatan. Thailand Utara dan Thailand Tengah didominasi oleh etnis Siam dan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Sementara itu wilayah selatan didominasi etnis Melayu dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Program ini menjadikan Thailand sebagai satu etnis dari Siam dan satu agama yakni Buddha. Thaifikasi dimulai dengan munculnya tanda mengenai pelarangan penggunaan bahasa Melayu dan seluruh masyarakat yang tinggal di negara Thailand harus memiliki rasa nasionalisme terhadap Thailand melalui penggunaan bahasa Thai dan adat istiadat (Fakhri, 2023). Kebijakan pemerintah Thailand ini secara tidak langsung untuk mengikis rasa nasionalisme Muslim melayu terhadap kebudayaan nenek moyang dan asal usulnya.

Bahasa Melayu sebagai bahasa ibu masyarakat Muslim Pattani berangsur-angsur digantikan oleh bahasa Thai oleh pemerintah Thailand. Penggunaan bahasa Melayu di Thailand merupakan kategori minoritas sebab pemerintah Thailand mengharuskan warga negaranya untuk memakai bahasa Thai (Jehwae, 2018). Hal ini dapat dilihat dari pihak kerajaan yang ikut serta dalam aktifitas pondok pesantren yang ada di wilayah Pattani. Pondok pesantren merupakan tempat menimba ilmu agama Islam bagi masyarakat Muslim Pattani. Pemerintah Thai memberikan dana kepada pondok pesantren yang sudah terdaftar namun dengan syarat bahwa pesantren tersebut menggunakan bahasa Siam/Thai dalam proses pengajaran. Sebelum adanya dukungan dari pemerintah Thai pondok-pondok pesantren biasanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam pembelajaran.

Tetapi untungnya, bahasa Melayu tetap digunakan sampai hari ini dalam berkomunikasi meskipun biasanya bahasa Thai lebih sering digunakan. Ini terlihat dari pengalaman informan FA yang berasal dari Pattani dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Indonesia.

“Ya waktu reformasi pemerintahan (penggunaan bahasa Melayu dilarang dan menekankan bahasa Thailand) sekolah kebangsaan masih dalam berbahasa Thailand. Bahasa Melayu di Pattani itu sebagai bahasa daerah jika di Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa kehidupan sedangkan bahasa Thailand cuman di sekolah kebangsaan. Dan bahasa Melayu itu ada diajarkan di TADIKA (Taman Didikan Kanak-Kanak).

Pada tahun 1971 pihak kerajaan mengumumkan bahwa semua pondok pesantren diwajibkan mendaftarkan lembaganya, apabila terdapat pondok pesantren yang luput dari program ini maka pemerintah secara tegas menutup lembaga pondok pesantren yang ada. Melalui cara ini pemerintah Thailand berusaha untuk mengurangi penggunaan bahasa Melayu bagi masyarakat Muslim Pattani. Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan terhadap pondok Melayu Pattani yakni dengan diubahnya nama-nama pondok pesantren menjadi sekolah Islam dan kurikulum disesuaikan dengan keinginan dari pemerintah Thai (Hifza & Aslan, 2019). Kemudian merujuk ke informan RC yang berasal dari Pattani dan saat ini sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Indonesia:

“Udah gak sih. Kalau dulu orang-orang Muslim ditekan banget kan (menggunakan bahasa Thai) dari segi budaya bahasa dll. Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah gak. Kalau untuk sekolah gitu pakek bahasa Thailand tapi kadang juga ada sebagian pakek bahasa Melayu jadi tergantung dosen yang ngajar gitu”

“Terkadang di lingkungan keluarga etnis Melayu menggunakan bahasa Melayu biasa gak ada yang pakek bahasa Thailand. Jadi tergantung lawan bicaranya juga tapi kebanyakan ngomong pakek bahasa Melayu”

Bagi masyarakat Muslim Pattani menggunakan bahasa Melayu merupakan jati diri dan usaha melestarikan warisan dari leluhur mereka. Kendati sekarang tempat tinggal Muslim Pattani berada di negara Thailand tetapi dahulunya mereka adalah orang-orang yang merdeka di bawah Kesultanan Pattani. Apabila penggunaan bahasa Melayu dilarang oleh pemerintah Thailand maka sama saja menghilangkan jati diri Muslim Pattani sebagai orang Melayu. Hasilnya kini anak-anak muda Muslim Pattani tidak selancar orang tua mereka dalam berbahasa Melayu meskipun terkadang ketika

di lingkungan rumah generasi muda diampu untuk berbahasa Melayu (Maduerawa, 2021). Bahasa Melayu telah tercampur oleh bahasa Thai sebab pemerintah Thailand mengharuskan warga negaranya untuk memakai bahasa Thai. Tinggal generasi tua yang dapat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Melayu.

Selain dari segi bahasa, masyarakat Muslim Pattani juga sering diberi julukan yang kurang menyenangkan dari masyarakat Thai-Buddha. Masyarakat Thai-Buddha menyebut masyarakat Muslim Pattani dengan julukan “*Khaek*” yang memiliki arti pendatang atau orang yang masuk dalam bahasa Thailand. Secara general “*Khaek*” merujuk kepada orang-orang yang memiliki kulit berwarna sawo matang seperti orang yang berasal dari India, Pakistan dan Asia. Kemudian “*Khaek*” terhubung ke sebuah kata malas, mementingkan diri sendiri, miskin, tidak dapat dipercaya, bodoh, kejam, tidak ramah, dan fanatik (Arismunandar et al., 2019).

Pelanggaran Ekonomi

Pasal-pasal yang terdapat di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menjadi dasar bagi perumusan dua konvensi pokok lainnya dalam bidang Hak Asasi Manusia yakni *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Right* (ICESCR) yang telah disetujui oleh 142 negara. Pembangunan yang tidak merata menimbulkan masyarakat miskin, apabila ditinjau lebih luas lagi menimbulkan berbagai krisis sosial ekonomi, politik, hukum dan kultural yang implikasinya akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri.

Dilihat dari aspek ekonomi wilayah selatan Thailand terbilang sangat tertinggal dibandingkan dengan penduduk yang berada di bagian utara. Meskipun hidup dalam kesuburan sumber daya alam nyatanya masyarakat Muslim Pattani hidup dalam kondisi kemiskinan lantaran pemerintah Thailand tidak membangun ekonomi secara signifikan di wilayah Thailand selatan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kesenjangan ekonomi begitu dirasakan oleh masyarakat Pattani contohnya pendapatan bulan 20.7% penduduk berada dibawah sekitar Rp. 2.863.000 (Fikri, 2020). Pada 2017 wilayah selatan menjadi wilayah yang tingkat kemiskinan paling tinggi di daerah lainnya di Thailand. Menurut penuturan dari informan FA

“Hasil bumi mereka (orang Pattani) di beberapa area dan dieksploitasi ke pusat Bangkok. Politik jabatan kuasa rata-rata dilantik langsung oleh pemerintah Thailand dan bukan orang tempatan”

Ibukota Bangkok mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Thailand, wilayah Tengah mendapatkan posisi kedua, sedangkan wilayah Utara, Timur Laut, dan Selatan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Wilayah-wilayah ini lebih miskin, rapuh, dan kurang terdiversifikasi, dan lebih bergantung kehidupan pada sektor pertanian. Daerah yang berbasis pertanian terbilang sensitif karena perubahan harga komoditas dan mengalami bencana alam termasuk kekeringan dan banjir. Pada 2016 Gallup World Poll melakukan survey yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk makan dan berteduh setidaknya sekali dalam setahun terakhir (Yang, 2019). Kemudian dari informan RC

“Untuk pembangunan pemerintah Thailand memang rata-rata gak rata sih lebih memperbaguskan di daerah tertentu seperti di Kota Bangkok”

Seperti dalam skripsi yang ditulis oleh Weam Yusoh (Yusoh, 2020) yang melakukan penelitian di Pattani. Skripsi ini menunjukkan bahwa perempuan atau istri ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah dengan bekerja di pasar Palas, Kabupaten Mayo, Pattani. Perempuan yang andil dalam pencarian nafkah dilatarbelakangi oleh pendapatan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun pada akhirnya perempuan harus menjalani peran ganda yakni bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Abdullah Dueramae (Dueramae, 2017) menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Parang Provinsi Pattani sebagai buruh harian dan di pertanian memiliki penghasilan di bawah standar. Kurangnya perekonomian yang dialami warga menimbulkan masalah di bidang pendidikan anak-anak mereka. Pendapatan yang dibawah standar dan tidak adanya motivasi belajar yang tinggi membuat anak-anak putus sekolah.

Dalam mengatasi kemiskinan masyarakat Pattani yang berbahasa Melayu dan bermata pencaharian sebagai petani belajar untuk berkomunikasi dengan bahasa Thai. Dengan mahir berbahasa Thai masyarakat Pattani mendapat peluang untuk belajar di institusi pemerintahan (Fitriah, 2019). Sebagaimana yang dituturkan oleh informan HC

“In Thai government have muslim minister”

Pemerintah Thailand seharusnya lebih berupaya untuk melakukan pembangunan ekonomi secara merata tetapi yang perlu diingat bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan efektif terhadap berkembang pribadi dan kelompok manusia yang efektif di negara Thailand. Selama proses pembangunan, penting untuk saling menghormati, menghargai serta melindungi hak asasi manusia dengan lebih baik.

Pelanggaran Hak Hidup

Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keselamatan. Mengenai pasal ini telah jelas bahwa HAM dari PBB memberikan jaminan atas hak untuk hidup (Zulfa, 2005). Ketegangan yang tidak kunjung berhenti menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuh di wilayah Thailand selatan. Tidak adanya dialog yang membuahkan hasil dan rasa ketidakadilan menyebabkan kekerasan yang terus menerus terjadi. Dari tahun 1979 hingga akhir 2003 tercatat sebanyak 233 kematian yang dikaitkan dengan kekerasan politik yang ada di provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat (Helmiati, 2016).

Selama masa jabatan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada bulan Ramadhan 2004 sebanyak orang 78 orang meninggal dalam peristiwa Tak Bai. Masih di tahun 2004 terjadi pembantaian oleh militer di sebuah masjid di Thailand selatan yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia di kalangan Muslim. Perkiraan orang-orang yang berjatuh di tahun 2004 sekitar 4.100 meninggal dunia dan 6.509 orang mengalami luka.

Ada 32 orang yang berlindung di Masjid Kerisik Thailand tidak luput terbunuh secara kejam. Peristiwa kekejaman di wilayah selatan ini adalah hasil dari Kerajaan Thaksin. Tindakan Thaksin sepenuhnya merasa didukung oleh pihak Amerika. Pada bulan Maret 2004 seseorang yang bernama Somchai Neelapahjit sebagai aktivis pejuang hak asasi manusia yang mewakili 9 orang Islam dituduh sebagai pelopor ditahan, disiksa, dan dibunuh oleh polisi Thailand. Tahun 2004 seperti menjadi tahun berdarah bagi masyarakat Islam Pattani, pada bulan Oktober terjadi peristiwa yang menewaskan 2 orang dan 21 mengalami luka-luka. Insiden ini berlangsung sehari

pasca terbunuhnya 84 orang Muslim di wilayah Thailand bagian selatan (Sanurdi, 2018).

Organisasi Kerjasama Islam turut ambil peran dalam proses penyelesaian masalah konflik di Thailand. Ketika peristiwa Tak Bai terjadi, Organisasi Kerjasama Islam merespons dengan menuntut dan menekankan kepada pemerintah Thailand untuk menghapus diskriminasi serta menjamin hak-hak minoritas, terutama hak-hak Muslim di Thailand selatan. Dalam kasus pergejolakan antara Muslim melayu dan pemerintah Thailand negara tetangga seperti Malaysia membantu dalam menyelesaikan konflik. Malaysia terdorong untuk menolong sebab keamanan negara Thailand terganggu karena banyaknya kelompok separatis yang melarikan diri ke daerah perbatasan Malaysia. Wilayah selatan Thailand berbatasan darat dengan Malaysia, sehingga memudahkan orang-orang untuk menyeberangi perbatasan. Malaysia mengambil kebijakan luar negeri untuk menyelesaikan konflik dan berperan sebagai mediator antara pemerintah pusat Thailand dan Thailand selatan. Konsolidasi tersebut bertujuan untuk mendamaikan Thailand dan Thailand selatan yang terus-menerus mengalami ketegangan sosial (SD & Amijoyo, 2019).

Dalam tulisan ini terdapat laporan terbaru pada bulan Juni 2024 yang memberikan keterangan lengkap dengan menggunakan gambar.



Gambar 1. Peristiwa di Pattani
Sumber Facebook Wartani

Ringkasan kejadian di wilayah Patani/provinsi perbatasan selatan Juni total ada 9 kejadian. Korban 4 orang, terluka 19 orang. Terjadi 5 peristiwa penembakan, tidak

ada pertempuran, ledakan 2 kali, dan pembakaran 2 kali. Kerusakan rakyat (masyarakat sipil) 14 orang, petugas (militer) 9 orang dan tidak ada kerusakan bagi kerusakan gerakan. Jenis kelamin yang mendominasi adalah laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan 6 orang. Terdapat 19 orang Buddha dan 4 orang Islam. Dari informasi yang telah disajikan, terlihat bahwa kondisi di Pattani hingga hari ini masih mengalami beberapa pergelutan. Pergolakan ini tidak hanya merambah komunitas Muslim tetapi juga komunitas Buddha.

Kondisi Masyarakat Muslim Pattani Masa Kini

Pada masa kini Pemerintah Thailand memang memberikan hak kebebasan untuk Muslim yang tinggal di Thailand selatan, terutama di Pattani, diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka dengan damai. Sebagaimana yang dituturkan oleh informan HC

“Thai government are support Islam community. Thai government help every religion”

Pemerintah Thailand memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren di Pattani dan wilayah selatan lainnya. Melalui keterlibatan pemerintah Thailand dalam pembangunan pesantren, telah diterapkan kurikulum baru yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Hubungan antara pemerintah Thailand dan masyarakat Muslim berjalan dengan baik di Pattani (Hakim & Noor, n.d.) . Terjadinya relasi yang bagus antara masyarakat dengan pemerintah memberikan efek yang positif untuk lini kehidupan masyarakat. Semua warga negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya dan terbebas dari rasa ancaman dari pihak manapun.

Meskipun Thailand selatan khususnya wilayah Pattani dikenal sebagai daerah yang bergejolak karena gerakan separatism seperti yang telah tersaji di gambar atas, pada masa kini ada salah satu contoh kegiatan masyarakat yang menarik di salah satu pasar yang berada di wilayah Pattani. Pasar tersebut diramaikan oleh berbagai golongan etnis yakni dari etnis Siam dan etnis Melayu. Mereka saling hidup rukun dan berbahasa sama yakni bahasa Thai. Wilayah Pattani etnis Muslim merupakan mayoritas mereka hidup berdampingan dengan penduduk yang non-Muslim. Hidup dengan saling menghormati adalah kunci utama bagi kedamaian dalam kehidupan.

Para tokoh agama dari kalangan Muslim dan kalangan Buddha berupaya untuk memberikan pemahaman kepada pengikutnya bagaimana cara hidup bersama dengan damai dan harmonis, untuk selalu menghormati perbedaan agama, berkegiatan bersama asalkan tidak sampai melanggar aturan dari masing-masing agama, menyuarakan bahwa tidak ada alasan apapun untuk melakukan kekerasan terhadap etnis lain apapun alasannya. Hal ini dilakukan untuk terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan menjauhi konflik. Mengingat perbedaan agama seringkali menjadi pemecah kedamaian hidup. Para individu diharapkan memiliki kesadaran diri untuk saling menghargai perbedaan yang ada, karena keberagaman dalam kehidupan memberikan warna-warni yang mencegah monotoninya pengalaman hidup terhadap satu warna saja.

Walaupun relasi telah terjalin dan belum bisa dikatakan sepenuhnya bagus ternyata pemerintah Thailand juga masih menaruh rasa curiga kepada wilayah selatan Thailand. Sejak 2019 pemerintah Thailand mewajibkan bagi orang-orang yang akan mendaftarkan SIM untuk mencantumkan data biometrik berupa sidik jari dan bentuk wajah, yang berlaku bagi semua penduduk, tetapi dampaknya paling dirasakan oleh warga Muslim Melayu yang tersebar di wilayah selatan Thailand. Selain itu, pada tahun 2021, pemerintah Thailand memasang 8.000 kamera sebagai bagian dari langkah keamanan untuk memantau aktivitas masyarakat Muslim di wilayah selatan.

Mengenai pemerintah Thailand yang masih menaruh curiga kepada masyarakat Muslim khususnya di Pattani informan RC memberikan konfirmasi bahwa *“Ya diantaranya masih.. ya masih cuman tidak kelihatan saja”*

Senada dengan itu, informan FM memberikan keterangan bahwa

“Tidak setegang sangat dan tidak sebegitu aman juga. Masih dalam keadaan konflik”

Meskipun terdapat ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal pada tahun-tahun sebelumnya, keduanya telah berunding untuk mencari solusi, dan kondisi di Pattani saat ini menuju perbaikan. Walaupun gerakan kekerasan belum sepenuhnya hilang, pemerintah Thailand telah memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan masyarakat Muslim Pattani.

KESIMPULAN

Masyarakat Muslim Pattani yang hidup di wilayah Thailand bagian selatan mengalami berbagai pelanggaran dari pemerintah Thailand. Pelanggaran hak sosial budaya dengan melarang masyarakat Muslim Melayu menggunakan bahasa Melayu di pondok-pondok pesantren. Pelarangan menggunakan bahasa Melayu dikhawatirkan generasi muda Pattani tidak dapat berbahasa daerah mereka dan lambat laun digantikan oleh bahasa Thai.

Pelanggaran hak ekonomi dirasakan oleh masyarakat Muslim Pattani sebab pemerintah Thailand tidak melakukan pembangunan secara signifikan sehingga masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Provinsi Pattani termasuk wilayah yang subur sumber daya alam tetapi dieksploitasi oleh pemerintah Thailand. Masyarakat mengantungkan kehidupan mereka dari hasil pertanian yang kadang kala hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pelanggaran hak hidup yang mana pemerintah Thailand melakukan penembakan kepada masyarakat Muslim yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Tahun 2004 terjadi pembantaian oleh militer di masjid Thailand selatan, ratusan orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Laporan pada Juni 2024 masih terdapat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di wilayah Pattani dan menyebabkan beberapa orang terluka dari kalangan Muslim maupun umat Buddha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, A., Afriantoni, A., & Asmuni, A. (2019). Melayu Pattani Thailand: Muslim Minority Religion Expression In The Middle Of Non Muslim Majority. *Journal of Malay Islamic Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/jmis.v3i1.4576>
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), Article 01. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>
- Djusmalinar, H. (2014). Character Of Malay Pattani Community In Literary Work. *International Conference on Languages and Arts*, 0(0), Article 0.

- Dueramae, A. (2017). *Dampak Kemiskinan Terhadap Tingkat Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kecamatan Yarang Provinsi Pattani Thailand Selatan)*.
- Fakhri. (2023). *Dinamika Muslim Pattani dan Tantangan Budaya di Thailand*. 1–11. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28769/>
- Fikri, S. (2020). Kebangkitan Dakwah Islam di Patani Selatan Thailand. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/tad.v2i2.3290>
- Fitriah, N. S. (2019). “*Tak Dok Po*”: Kekhasan Ekonomi Bahasa Melayu Thailand.
- Hafil, M., & Damayanti, I. (2021, December 16). *Mengenal Lebih Dekat Sejarah Muslim di Thailand Selatan*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/r472vf430>
- Hakim, S., & Noor, C. H. (n.d.). *Pemerintah Thailand berikan perhatian bagi muslim di Pattani—ANTARA News*. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/1044666/pemerintah-thailand-berikan-perhatian-bagi-muslim-di-pattani>
- Hasyim, D. (2018). Identification Of Racial And Ethnic Discrimination According To Law Number 40 Of 2008 And Discrimination Women According To Law No. 7 Of 1984 In Civil Code. *Jurnal Hukum De'rechtsstataat*, Vol. 4 No.1. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/1234>
- Helmiati. (2016). *Pergulatan Minoritas Muslim Thailand: Menelisik Peran Akademisi, Tokoh Agama & LSM dalam Upaya Mencari Solusi Konflik Berkepanjangan*. CV. Literasi Nusantara Abadi. <https://repository.uin-suska.ac.id/26554/>
- Hidayat, A. A. (2022). *Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hifza, H., & Aslan, A. (2019). Problematika Pendidikan Islam Melayu Patani Thailand. *Al-Ulum*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.30603/au.v19i2.864>
- Jamaludin, J. (2017). Gerakan Pembebasan Islam Patani di Thailand Selatan Studi terhadap Patani United Liberation Organization (1968-1993). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1304>

- Jehwae, P. (2018). The Role Of Malay Language And Literature As A Media For Peace in Patani Thailand And The Archipelago. *Journal of Malay Islamic Studies*, 2(1), 75–86. <https://doi.org/10.19109/JMIS.v2i1.2549>
- Kaewsom, C., Ismail, S., Taya, S. L., & Ghani, A. B. A. (2012). Conflict Between Thai Muslims and Thai State in Southern Thailand: Historical Perspectives. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v1i2.730>
- Kondisi Hak Asasi Manusia Di Dunia. (2024). *Amnestasy International*.
- Kusuma, B. M. A. (2016). Masyarakat Muslim Thailand Dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2016.131-06>
- Maduerawa, M. (2021). Pattani Malay's Culture And Its Relationship To Education South Thailand. *Edusoshum : Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Humaniora*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v1i3.25>
- Nuereng, M. I. (2017). Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/inright.v5i2.1438>
- Ramadhan, T. (2021). Hikayat Pattani dan Eksistensi Masjid di Negeri Pagoda: Umat Islam Thailand dalam Pusaran Harmoni dan Konflik. *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3 No. 2.
- Rifa'i, A. H. (2024). Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 6(04), 07–14. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i4.27884>
- Sanurdi. (2018). Islam di Thailand. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2.
- SD, H. A., & Amijoyo, R. R. S. (2019). Kebijakan Luar Negeri Najib Razak Terhadap Konsolidasi Thailand Dan Gerakan Aliansi Separatisme Etnis Melayu Di Thailand Selatan Di Tahun 2013-2016. *MANDALA Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.2 No.1.
- Yang, J. (2019). *Reducing poverty and improving equity in Thailand: Why it still matters.* World Bank Blogs.

<https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/reducing-poverty-and-improving-equity-thailand-why-it-still-matters>

Yuliani, Y., & Purwanto, E. (2022). Pendidikan Islam di Thailand. *EDUCATIONAL JOURNAL : General and Specific Research*, 2(1), Article 1.

Yusoh, W. (2020). *Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Pasar Palas, Pattani Selatan Thailand*.

Zulfa, E. A. (2005). Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 2(2). <https://doi.org/10.47007/lj.v2i2.230>

<https://web.facebook.com/photo.php?fbid=887522376746853&set=pb.100064672960798.-2207520000&type=3>